

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian Strategi Implementasi Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo



**Badan Lingkungan Hidup, Riset dan
Teknologi Informasi**

(BALIHRISTI)

Provinsi Gorontalo

2 0 1 2

INTISARI

Penelitian ini berjudul Strategi Implementasi Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo pada tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui bagaimanakah persepsi masyarakat tentang Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo; (2) Untuk mengetahui bagaimanakah Skenario Pembiayaan Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo; (3) Untuk mengetahui apakah Landasan Hukum yang mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo; dan (4) Untuk mengetahui bagaimanakah strategi implementasi pendidikan gratis di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan disain metode campuran dengan alat analisis berupa analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis burden sharing, analisis biaya satuan pendidikan, analisis konten dan analisis SWOT.

Hasil penelitian diperoleh temuan sebagai berikut : (1) persepsi masyarakat tentang pengertian pendidikan gratis masih beragam yaitu ada yang memahami pendidikan gratis adalah pembiayaan penuh seluruh komponen biaya pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo; ada yang memahami pendidikan gratis adalah pembiayaan terbatas oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap biaya pungutan oleh sekolah terhadap orang tua siswa; dan ada yang memahami pendidikan gratis adalah program pendidikan untuk orang miskin. (2) Dari aspek pembiayaan, skenario pembiayaan yang rasional untuk diimplementasikan adalah pembiayaan terbatas oleh Pemerintah Daerah terhadap biaya pungutan oleh sekolah terhadap orang tua siswa, karena pada skenario ini Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kemampuan anggaran untuk mengimplementasikan program ini, hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp Rp 71.970.998.700, di mana sesuai pagu indikatif Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo untuk tahun 2013 adalah Rp 88.000.000.000. (3) Dari aspek hukum, Peraturan Gubernur Nomor 9A tahun 2012 dianggap tidak memadai lagi untuk menjadi landasan hukum Program Pendidikan Gratis, karena masih lemah dalam hal konten dan legitimasi hukumnya. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo. (4) Berdasarkan analisis SWOT ditemukan bahwa total nilai atau skor dari posisi Faktor Strategis Internal (IFAS) Implementasi Program Pendidikan Gratis adalah 3.01. Ini artinya secara internal Program Pendidikan Gratis memiliki posisi yang kuat. Dengan kata lain, implementasi program pendidikan gratis ini dapat dilaksanakan.

**Kata Kunci : Strategi, Implementasi, Pendidikan Gratis*

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendidikan adalah faktor penentu kemajuan dan kemakmuran bangsa pada masa depan. Jika kita sebagai bangsa, berhasil membangun dasar-dasar pendidikan nasional dengan baik, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan di bidang-bidang lain. Dalam konteks ini pendidikan menjadi salah satu bentuk investasi modal manusia (*human investment*) yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa dan pada gilirannya akan membawa bangsa tersebut mencapai kemajuan dan kemakmuran.

Dalam konteks otonomi daerah kebijakan pendidikan diarahkan pada pola desentralisasi, di mana urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Terkait dengan otonomi daerah tersebut, pemerintah Provinsi Gorontalo dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru yaitu Drs. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Idris Rahim, MM menggagas kebijakan Pendidikan Gratis. Kebijakan ini sesungguhnya sebagai upaya mendukung program pemerintah dibidang pendidikan dan sekaligus sebagai pengejawantahan salah satu program unggulan Provinsi Gorontalo yaitu peningkatan sumberdaya manusia yang diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam mendukung suksesnya pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Provinsi Gorontalo sebagai institusi teknis yang bertanggung jawab untuk

mengimplementasikan program dan kebijakan ini dalam pelaksanaannya menggunakan istilah Program Pendidikan untuk Rakyat atau disingkat dengan nama PRODIRA. Adapun tujuan dari program ini adalah :

- 1) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- 2) Meningkatkan layanan pada semua jenjang pendidikan untuk terwujudnya kualitas dan relevansi pendidikan;
- 3) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/Swasta terhadap biaya operasional satuan pendidikan, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah program ini berjalan secara efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi alasan kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Strategi Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Provinsi Gorontalo.**

Dalam penelitian ini permasalahan yang kami angkat adalah :

- (1) Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo?;
- (2) Bagaimanakah Skenario Pembiayaan Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo?;
- (3) Apakah Landasan Hukum yang mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo?;
- dan (4) Bagaimanakah strategi implementasi pendidikan gratis di Provinsi Gorontalo.

Guna menjawab 4 (empat) permasalahan yang dikemukakan di atas, maka disain penelitian yang kami gunakan adalah metode

campuran (*mix methods*). Sedangkan Strategi yang digunakan adalah *Metode Campuran Konkuren* yaitu menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif pada satu waktu, kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan. (*Lihat Creswell, 2009*). Di mana untuk memperoleh data yang sesuai dengan disain penelitian ini, kami menggunakan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan survey. Sedangkan untuk menganalisis data, dalam penelitian ini digunakan metode taksonomi, komponensial, analisis burden sharing, analisis biaya satuan pendidikan, dan analisis SWOT.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data ditemukan bahwa :

1. Persepsi masyarakat tentang pengertian pendidikan gratis masih beragam yaitu ada yang memahami pendidikan gratis adalah pembiayaan penuh oleh pemerintah terhadap seluruh komponen biaya pendidikan; ada yang memahami pendidikan gratis adalah pembiayaan terbatas oleh pemerintah, yaitu hanya bebas biaya pungutan yang dilakukan oleh sekolah pada siswa / orang tua siswa; dan ada yang memahami pendidikan gratis adalah program pendidikan untuk orang miskin. Beragamnya persepsi masyarakat tentang pengertian pendidikan gratis ini dapat dimaklumi, karena sumber informasi tentang program pendidikan gratis yang diperoleh masyarakat juga beragam. Di mana yang lebih dominan adalah informasi dari media (Koran, radio dan televisi), dan hanya sedikit yang memperoleh informasi dari sosialisasi langsung oleh pemerintah (penjelasan teknis dari Dinas Pendidikan, baik tingkat Provinsi

maupun Kabupaten). Padahal informasi yang lebih valid dan utuh seharusnya berasal dari sosialisasi pemerintah dan bukan hanya diserahkan kepada komite sekolah atau melalui media saja.

2. Dalam kaitannya dengan masalah pembiayaan pendidikan, konsep pendidikan gratis dalam pengertian pembiayaan terbatas atau bebas pungutan biaya pendidikan adalah konsep yang paling rasional dan dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Alasannya sederhanya yaitu setelah dilakukan analisis burden sharing, Pemerintah Provinsi Gorontalo hanya perlu menyediakan alokasi dana sebesar Rp 71.970.998.700 untuk pembiayaan pendidikan gratis. Di mana berdasarkan pagu indikatif, alokasi anggaran pendidikan pada APBD Provinsi Gorontalo tahun 2013 untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp 88.000.000.000. Demikian pula ketika dilakukan analisis biaya satuan pendidikan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sampel, maka biaya per siswa untuk SMU berkisar antara Rp 1.120.000 per tahun atau Rp 93.333 per bulan sampai dengan Rp 1.392.717 per tahun atau Rp 116.060 per bulan. Sedangkan biaya per siswa untuk SMK berkisar antara Rp 1.320.000 per tahun atau Rp 110.000 per bulan sampai dengan Rp 1.473.170 per tahun atau Rp 122.764 per bulan. Jadi jika dikaitkan dengan implementasi PRODIRA untuk tahun 2012 yaitu untuk SMU dan Madrasah Aliyah sebesar Rp 1.000.000 per tahun atau Rp 83.000 per bulan dan untuk SMK sebesar Rp 1.200.000 per

tahun atau Rp 100.000 per bulan, maka alokasi dananya sudah memadai dan masih sesuai dengan kebutuhan sekolah dan siswa.

3. Peraturan Gubernur No. 9A tahun 2012 tentang Pendidikan Gratis masih lemah dalam hal konten dan legitimasi hukumnya. Karena masih banyak hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Gubernur tersebut dan secara yuridis belum mendapat pengakuan dari masyarakat karena tidak melalui pembahasan secara bersama-sama dengan DPRD Provinsi Gorontalo sebagai representase masyarakat dalam pemerintahan daerah.
4. Setelah dilakukan analisis SWOT terhadap kondisi obyektif implementasi Program Pendidikan Gratis tahun 2012, ditemukan bahwa posisi faktor strategis internal (IFAS) penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis skornya cukup baik yaitu dengan total nilai **3,01**. Di mana dalam menghadapi dinamika lingkungan internal posisi perusahaan ataupun Daerah relatif kuat (Rangkuti, 1999), dalam artian bahwa dengan keadaan yang ada Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengimplementasikan Program Pendidikan Gratis dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengurangi atau mengantisipasi kelemahan dalam mengimplementasikan program pendidikan gratis tersebut.

Dari berbagai temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari sisi pengertian dan pembiayaan, sesungguhnya Konsep Program Pendidikan Gratis dalam pengertian pembiayaan terbatas atau bebas biaya pungutan yang lebih tepat untuk diimplementasikan oleh

Pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk mendukung implementasi konsep Program Pendidikan Gratis dalam pengertian pembiayaan terbatas atau bebas biaya pungutan tersebut, maka beberapa alternatif strategi yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya komitmen bersama antar Kepala Daerah 6 Kabupaten/ Kota untuk mengkampanyekan Program Pendidikan Gratis di daerah masing-masing.
2. Membangun Kesepakatan bersama dalam pembiayaan Pendidikan Gratis melalui Sharing Anggaran Pemerintah Kab./ Kota. Kesepakatan ini harus dibarengi dengan pembagian peran pembiayaan maupun peran pengelolaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Perlunya segera dirumuskan Peraturan Daerah yang mengatur Program Pendidikan Gratis
4. Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengembangkan Program yang mewajibkan anak usia sekolah (6-12 tahun) untuk mengikuti program pendidikan gratis
5. Sosialisasi Pendidikan Gratis secara intensif oleh Dinas Terkait baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui media sosialisasi berupa panplet, brosur, buletin dan juga melalui koran, radio dan televisi. Di mana dalam khusus untuk Brosur, Panplet dan Buletin tersebut berisi secara ringkas tentang latar belakang penyelenggaraan program pendidikan gratis, definisi dan pengertian tentang program pendidikan gratis, maksud dan tujuan

dilaksanakannya program pendidikan gratis, struktur organisasi pelaksana, kalender kegiatan program pendidikan gratis dan alokasi anggaran program pendidikan gratis.

6. Pengembangan Program pendidikan terjangkau dan bermutu oleh SKPD terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota tahun 2013.
7. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program pendidikan gratis.